

**PROGRAM KERJA
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA
(PERBARINDO)
PERIODE 2014 - 2018**

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan pendapatan masyarakat, peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sangat besar artinya, terutama dalam meningkatkan usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1998 berhasil kita lalui, dimana industri BPR/BPRS telah membuktikan dirinya mampu bangkit di tengah krisis ekonomi yang begitu dahsyat pada saat itu. Namun pada tahun 2008 datang lagi krisis berikutnya, yang kali ini ternyata membawa dampak yang kurang baik bagi industri BPR secara nasional.

Belajar dari dua krisis tersebut, maka pelaku industri BPR telah bertekad untuk terus memperbaiki diri melalui peningkatan kualitas di berbagai bidang kegiatan, terutama dalam bidang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, sehingga mampu untuk terus tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kondisi apapun.

Sudah terbukti dalam perjalanannya bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada masa era krisis ekonomi sampai sekarang ini masih tetap eksis, bahkan menunjukkan pertumbuhan yang sangat berarti, yang dibuktikan dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang akhir-akhir ini sebagian besar merupakan kontribusi dari UMKM. Negara lainpun mulai melirik kembali keberadaan UMKM di Indonesia, karena melihat dari potensi dan segmen market yang cukup luas ada di negara ini. Oleh karena itu, kita sebagai bagian dari pelaku ekonomi jangan terlena dengan keberhasilan yang sudah dicapai sekarang ini.

Pemerintah dewasa ini cenderung untuk meningkatkan dan menggalakkan sektor ekonomi rakyat atau UMKM untuk memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sukses tidaknya ekonomi daerah diantaranya sangat tergantung pada kemampuan memobilisasi dana masyarakat dan melakukan pembiayaan usaha yang membutuhkannya. BPR sebagai lembaga intermediasi tentunya mempunyai kedudukan strategis dalam menangkap peluang yang sangat besar itu.

Perbarindo sebagai asosiasi BPR/BPRS yang berperan sebagai infrastuktur dapat lebih aktif dalam memperjuangkan BPR/BPRS sebagai lembaga keuangan perbankan secara terarah dan terpadu untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan ekonomi dengan langkah-langkah awal terlebih dahulu membuat program kerja secara umum yang kongkrit dan dapat dijalankan secara berkesinambungan, realistis dan tetap berorientasi kedepan. serta dapat mengikuti perubahan/perkembangan yang ada.

Munas IX Perbarindo memandang perlu untuk menyusun program kerja yang disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku serta perkembangan yang diperkirakan dimasa yang akan datang dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Munas IX Perbarindo menyusun Program Kerja dengan 4 (empat) materi bidang kegiatan;

- A. Bidang Organisasi
- B. Bidang Kelembagaan
- C. Bidang Teknologi Informasi (TI) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- D. Bidang Umum.

Adapun Program Kerja yang berhasil dirumuskan oleh Komisi A pada Munas IX Perbarindo yaitu sebagai berikut :

A. BIDANG ORGANISASI

1. Memantapkan konsolidasi organisasi pada lingkup nasional maupun daerah, sehingga mekanisme komunikasi dan informasi diantara anggota serta seluruh unit yang ada pada Organisasi dapat berjalan dengan baik dan serasi satu sama lainnya.
2. Melaksanakan semua ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah di tinjau dan di tetapkan kembali dalam Munas IX Perbarindo, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
3. Memfungsikan seluruh pengurus organisasi baik yang berada di pusat maupun di daerah sesuai dengan pembidangan tugas dalam organisasi sehingga semua anggota pengurus dapat berperan serta secara aktif dan integratif mengimplementasikan program DPP, DPD dan DPK.
4. Melakukan upaya-upaya agar Perbarindo dan anggota-anggotanya mempunyai orientasi wawasan organisasi yang utuh dan kokoh, diantaranya dengan melengkapi atribut-atribut organisasi berupa Motto, Logo, Bendera, Hymne, Kartu Anggota, Sertifikat Anggota dan bentuk lainnya guna menumbuhkan atau mempererat rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa solidaritas diantara sesama BPR/BPRS anggota.
5. Perbarindo sebagai organisasi yang telah diakui keberadaannya akan terus berupaya untuk merangkul BPR/BPRS yang belum menjadi anggota melalui DPD di masing-masing daerah serta mewujudkan pendirian DPD di setiap provinsi.
6. Meningkatkan profesionalisme pengurusan, sehingga eksistensi Perbarindo sebagai asosiasi, diterima oleh semua stakeholders sebagai wadah perjuangan bagi seluruh BPR/BPRS di Indonesia.
7. Memberikan pelayanan dan pembinaan sesuai hak dan kewajiban masing-masing anggota serta memberikan sanksi kepada Anggota yang tidak mentaati AD/ART Perbarindo.
8. Meningkatkan fungsi gedung kantor yang telah dimiliki dengan melengkapi sarana dan prasarana kantor yang memadai serta dikelola oleh SDM yang profesional.
9. Membuat peraturan Perhimpunan yang diperlukan untuk melengkapi Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) Perhimpunan.

B. BIDANG KELEMBAGAAN

1. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama untuk menciptakan nilai tambah yang saling menguntungkan bagi para anggota.
2. Memberikan masukan, melakukan antisipasi dan evaluasi terhadap Undang-undang dan peraturan-peraturan serta kebijakan yang akan dikeluarkan regulator, khususnya di bidang perbankan, perpajakan, keuangan dan moneter sehingga berpihak kepada BPR/BPRS.
3. Mengadakan penelitian-penelitian lapangan dan literatur baik yang dilaksanakan sendiri ataupun bekerjasama dengan lembaga lain untuk memperoleh data-data yang faktual guna menyusun konsep-konsep pemikiran khususnya usaha-usaha dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengembangan BPR/BPRS sebagai masukan yang akurat kepada Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta regulator lainnya dan DPD/DPR-RI sebagai bahan penyusunan Undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berkaitan BPR/BPRS.
4. Aktif memberikan masukan dan tanggapan dalam penyusunan dan/atau perubahan *Blueprint* BPR serta Arsitektur Perbankan Indonesia (API).
5. Mendorong kerjasama/kemitraan (*Linkage Program*) antara Bank Umum, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau lembaga lainnya dengan BPR/BPRS.
6. Terus memperjuangkan BPR/BPRS sebagai Lembaga Keuangan Mikro perbankan yang dapat diikutsertakan dalam program-program Pemerintah dalam rangka penyaluran kredit program kepada UMKM.
7. Mengoptimalkan Apex Bank yang sudah berjalan dan terus mendorong terbentuknya Apex-Apex Bank lainnya, yang mempunyai fungsi utama sebagai Penyangga Likuiditas, *Polling of Fund* dan *Lender of The Last Resort*, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya.
8. Mendorong pendirian BPR/BPRS baru, khususnya di daerah yang populasi BPR/BPRS masih terbatas.

9. Mengupayakan kerjasama dengan lembaga penjamin kredit yang sudah ada.
10. Mempertahankan kedudukan BPR/BPRS dalam sistem perbankan nasional.
11. Berperan dalam pembentukan Lembaga Alternatif Peyelesaian Sengketa (LAPS) Perbankan dan serta menempatkan wakil Perbarindo untuk duduk di lembaga tersebut.
12. Meningkatkan hubungan kerjasama/kemitraan yang baik dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, DPD-DPR RI dan Lembaga Pemerintah maupun swasta lainnya.
13. Turut berperan aktif dalam setiap program pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM baik ditingkat pusat maupun di daerah.
14. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mencari sumber pendanaan untuk BPR/BPRS sebagai penyangga likuiditas.
15. Memperjuangkan kepada regulator agar terciptanya iklim persaingan yang sehat di industri perbankan.
16. Memperjuangkan kepada regulator (OJK) agar recycling (insentif pengembalian atas pungutan OJK) dipergunakan untuk penguatan SDM, Branding industri BPR/BPRS dan Penguatan Asosiasi.
17. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), DPD-DPR RI, DPRD dan Pihak Penegak Hukum.
18. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan Asosiasi Lembaga Keuangan dan Pihak lainnya yang memiliki perhatian kepada industri BPR/BPRS baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

C. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Melakukan kajian dan penilaian bersama-sama Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya terhadap vendor-vendor TI yang menawarkan Teknologi Informasi kepada BPR/BPRS.
2. Melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan vendor-vendor TI dalam pengadaan *Core Banking System* bagi BPR/BPRS yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan industri.
3. Meningkatkan pengelolaan Website Perbarindo yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Anggota dan Stakeholders.
4. Mendorong terciptanya Produk Bersama BPR/BPRS yang berbasis TI.
5. Mendorong kerjasama dengan Bank Umum dan lembaga lain dalam pengembangan produk dan layanan BPR/BPRS yang berbasis TI.
6. Mengoptimalkan peran LSP Certif dalam menyusun dan menyempurnakan Program Sertifikasi secara teratur dan terpadu untuk meningkatkan keahlian dan profesionalisme SDM BPR/BPRS, baik untuk tingkat Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Staf, yang sesuai dengan kebutuhan.
7. Mendorong DPD-DPR PERBARINDO bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya untuk dapat memberikan pelatihan kepada BPR/BPRS anggota.
8. Menyelenggarakan seminar-seminar, lokakarya, dan event lainnya yang berkaitan dengan industri BPR/BPRS.
9. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya untuk pengembangan kualitas SDM BPR/BPRS, termasuk diantaranya adalah pengembangan Modul dan Program Sertifikasi.
10. Aktif memberi masukan kepada regulator agar tercipta peraturan yang mendukung pengembangan SDM BPR/BPRS.
11. Mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di sektor Perbankan dan Kode Etik Bankir BPR/BPRS.
12. Memberikan Advokasi kepada anggota Perbarindo dan bekerjasama dengan lembaga advokasi untuk memfasilitasi Anggota Perbarindo dalam menghadapi permasalahan hukum.
13. Membangun learning center BPR untuk meningkatkan sumber daya manusia.

D. BIDANG UMUM

1. Menjaga, memelihara dan meningkatkan citra industri BPR/BPRS dan Perbarindo, sehingga lebih dipercaya oleh masyarakat dan stakeholders lainnya.
2. Turut serta menggali potensi ekonomi di daerah yang belum secara optimal dimanfaatkan, sehingga mempunyai daya dukung terhadap perkembangan industri BPR/BPRS.
3. Meningkatkan peran serta BPR/BPRS di masing-masing daerah dalam optimalisasi fungsi intermediasi terhadap UMKM.
4. Mengupayakan agar terjalinnya tali persaudaraan antar sesama BPR/BPRS anggota yang lebih erat lagi, melalui berbagai kegiatan bersama.
5. Mengoptimalkan dan mendorong penerbitan majalah/buletin/website Perbarindo dan media lainnya baik di pusat maupun di daerah, dalam upaya meningkatkan komunikasi dan informasi antar sesama anggota, DPP, DPD, DPK dan stakeholders lainnya.
6. Berperan aktif dan mendorong BPR/BPRS dalam rangka melakukan edukasi literasi Keuangan kepada masyarakat.
7. Melakukan publikasi industri BPR/BPRS secara nasional dan berkesinambungan dalam rangka membangun citra industri BPR/BPRS dan mengkonter terhadap berita negatif.
8. Memfasilitasi terwujudnya produk bersama sesuai karakteristik bisnis BPR dan kebutuhan Masyarakat.
9. Memfasilitasi kegiatan bersama DPP, DPD dan DPK Perbarindo.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Oktober 2014